

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Ombudsman Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga yang lahir sebagai wujud demokratisasi di Indonesia terhadap pengawasan penyelenggaraan negara menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu karakteristik *good governance* yang secara signifikan dibutuhkan dalam konsep pengawasan pelayanan publik yakni efektivitas. Keseimbangan dalam proses *check and balance* dalam pengawasan penyelenggaraan PPDB dibutuhkan untuk menciptakan *good governance*. Peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik secara independen diperlukan agar tidak terjadi kontrol absolut atas formulasi kebijakan PPDB.

Pada pengawasan penyelenggaraan PPDB tahun 2021, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah menemukan beberapa permasalahan yang menjadi faktor pemicu maladministrasi, antara lain: keterbatasan waktu sosialisasi kebijakan PPDB yang singkat, konsultasi dan pengaduan masyarakat yang tidak tuntas di tingkat satuan pendidikan dan dinas pendidikan, kesiapan integrasi data oleh penyedia aplikasi yang masih minim, daya tampung sekolah yang tidak transparan, pencatatan data kependudukan yang tidak akurat, serta adanya pemberlakuan kebijakan zonasi.

Simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yakni pengawasan PPDB yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah efektif. Hal tersebut dilihat dari pelaksanaan saran atas temuan Ombudsman sesuai peraturan perundangan dan juknis, keberhasilan menyelesaikan laporan, kemudahan akses melapor, tingkat kepuasan masyarakat yang mengakses pengaduan, serta tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan. Namun demikian masih diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan sistem pengawasan, mengingat luasnya wilayah Provinsi Jawa Tengah serta ketersediaan sumber daya yang minim. Independensi dan kekuatan organisasi, ketersediaan sumber daya, dukungan masyarakat, serta kepatuhan pemerintah terhadap rekomendasi Ombudsman menjadi faktor yang saling berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan Ombudsman. Upaya yang berkesinambungan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dalam menangani maladministrasi pada penyelenggaraan PPDB, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengambilan kebijakan PPDB mendatang.

## **5.2 Saran**

Dengan memperhatikan hasil pengawasan penyelenggaraan PPDB tahun 2021 yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, efektivitas pengawasan telah memberikan dampak positif yakni adanya perbaikan kebijakan dalam penyelenggaraan PPDB sehingga meminimalisir maladministrasi. Terhadap kendala-kendala yang muncul

dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Melakukan perencanaan yang matang sebelum pembentukan tim deteksi maladministrasi dalam penyelenggaraan PPDB;
- b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk mengatasi keterbatasan personil; dan
- c. Pelaksanaan sosialisasi yang lebih menarik dan menggugah kesadaran masyarakat untuk melaporkan maladministrasi dalam PPDB. Selain itu, dapat memperluas jejaring melalui organisasi kemasyarakatan/ tokoh masyarakat untuk turut mensosialisasikannya sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah di Provinsi Jawa Tengah.